

MULAI HARI INI, PASAR MURAH RAMADAN DIHELAT

Pemkab Beri Biaya Reduksi Rp 2.000 Tiap Komoditas

SLEMAN (KR) - Mulai hari ini, Kamis (6/3), Pemkab Sleman melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menggelar pasar murah Ramadan. Gelaran ini bertujuan untuk menstabilkan harga, sekaligus upaya menghadirkan barang kebutuhan pokok (bakop) kepada masyarakat dengan harga yang relatif terjangkau.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa pada acara High Level Meeting TPID Sleman di Ruang Sembada Setda Sleman, Rabu (5/3). Pertemuan juga dihadiri Asekda Haris Martapa, Asisten Direktur Bank Indonesia (BI) Arya Jodilistyo, Kepala BPS Sleman Rintang Awan, Manager Keuangan Bulog DIY Joko Prasetyo dan stakeholder terkait.

Menurut Danang, pasar murah Ramadan ini merupakan hasil kerja sama Pemkab Sleman bersama

Bank Indonesia, Bulog dan sejumlah mitra ini mulai tanggal 6 - 21 Maret 2025. Adapun pelaksanaan tahun ini berbeda dibanding tahun sebelumnya. “Kalau tahun lalu pelaksanaannya di tingkat Kecamatan, tahun ini berbasis Kalurahan. Total ada 36 Kalurahan yang akan menjadi lokasi pasar murah selama pelaksanaan dua pekan tersebut. Peluncuran pasar murah Ramadan dilaksanakan di GOR Bimoseno Kalurahan Pandowoharjo Sleman,” jelasnya.

Sementara Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sleman Mae Rusmi Suryaningsih mengatakan, Pemkab Sleman memberikan biaya reduksi atau potongan harga untuk setiap komoditas yang dijual. Biaya reduksi sebesar Rp 2.000 untuk per kilogram atau per liter komoditas yang dijual,” katanya.

Menurut Mae, sejumlah komoditas barang kebutuhan pokok akan dijual di pasar murah tersebut. Antara lain, beras premi-

um kemasan 5 kilogram dijual dengan harga Rp 61.500/kemasan. Sedangkan beras kualitas medium dengan kemasan 5 kilogram Rp 55.000/kemasan. Gula pasir dijual Rp 15.500/kilogram. minyak goreng premium Rp 18.000/liter. tepung terigu Rp 9.300/kilogram. telur ayam Rp 25.000 per kilogram dan karkas daging ayam 1 ekor dijual Rp 32.000.

“Semua harga tersebut sudah direduksi (potongan harga). Sehingga harga ini yang sampai ke masyarakat dan jauh lebih murah,” jelasnya.

Disinggung sistem pembelian di pasar murah tersebut, Mae menyebut warga yang akan membeli



KR-Hasto Sutadi

Wabup Danang Maharsa memimpin high level meeting TPID Sleman untuk persiapan lebaran.

akan mendapat nomor urut. Setelah mendapat nomor, bisa menunggu giliran dipanggil petugas

untuk mengambil komoditas yang akan dibeli sekaligus membayarnya. Jadi tidak akan ada antre-

an atau desak-desakan untuk mendapatkan sembako murah,” bebernya. **(Has)-f**

Bupati Buka Kampung Ramadan Wedomartani

SLEMAN (KR) - Kampung Ramadan Wedomartani hadir sebagai salah satu rangkaian kegiatan dalam menyambut 1 Dekade DRW Skincare. Selain kegiatan sosial, DRW bersama Bupati Sleman Harda Kiswaya turun ke jalan membagikan takjil kepada para pengunjung Kampung Ramadan Wedomartani, Selasa (4/3).

Bupati Harda Kiswaya mengaku bersyukur atas kegiatan positif tersebut. Menurutnya, UMKM merupakan salah satu pilar ekonomi karena pelaku ekonomi terbesar berasal dari UMKM.

“Kegiatan UMKM di rute jalan Stadion Maguwoharjo ini sudah beberapa tahun membawa perkembangan daerah Wedomartani menjadi daerah sentra



KR-Risbika Putri

Pembukaan Kampung Ramadan Wedomartani.

ekonomi ini yang membantu. Banyaknya UMKM yang mampu mendorong roda-roda ekonomi daerah ini,” ujar Harda.

Sementara Founder & CEO PT DRW Corpora Indonesia dr Wahyu Triasmara mengungkapkan ji-

ka kegiatan ini merupakan rangkaian dari 1 Dekade DRW Skincare. “Tahun ini, kami memilih Wedomartani sebagai lokasi Kampung Ramadan bukan tanpa alasan. Kami melihat ada peluang yang luar biasa dari pengelolaan

UMKM. Jadi sangat disayangkan jika tidak didukung secara maksimal,” ujarnya.

Kampung Ramadan Wedomartani berlangsung selama bulan puasa di Jalan Stadion Maguwoharjo. Dalam acara pembukaan tersebut dimeriahkan dengan pembagian doorprize, lomba, serta performa penyanyi Tyok Satrio.

Wahyu berharap acara ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat serta menjadi momen refleksi dalam perjalanan menuju satu dekade DRW Skincare. “Semoga kali ini menambah, menginisiasi, dan juga menumbuhkan UMKM di wilayah Wedomartani yang luar biasa,” paparnya. **(*3)-f**

Digitalisasi Rambah Pelayanan Publik



KR-Istimewa

Lurah Sambirejo Prambanan Sleman Wahyu Nugroho SE.

SLEMAN (KR) - Inovasi dan kreativitas menjadi kata kunci dalam hal pelayanan publik. Terlebih saat ini sudah memasuki era digital yang semestinya menyuguhkan ke-

mudahan bagi masyarakat secara luas.

Hal tersebut yang terus digenjut Kalurahan Sambirejo Prambanan Sleman. Mereka secara maksimal memanfaatkan berbagai platform digital untuk memberikan akses layanan kepada masyarakat. Sehingga kini masyarakat dapat mengakses layanan administrasi dan informasi dengan lebih cepat dan mudah melalui aplikasi SempelDesa, WhatsApp, Instagram, website resmi serta berbagai media sosial lainnya yang diluncurkan secara resmi mulai 23 Desember 2024.

“Dengan aplikasi SempelDesa, warga tidak perlu lagi datang langsung ke kantor kalurahan untuk mengurus berbagai keperluan administrasi. Aplikasi ini memungkinkan pengajuan surat, mempermudah pelaku UMKM dalam menjual produknya serta mendapatkan informasi layanan lainnya secara daring. Keunggulan lainnya fitur noti-

fikasi yang akan memberi tahu warga jika ada informasi penting terkait pengajuan mereka,” kata Lurah Sambirejo Prambanan Sleman, Wahyu Nugroho SE, belum lama ini.

Ditambahkan Wahyu, pihaknya juga mengoptimalkan layanan melalui WhatsApp. Warga dapat menghubungi nomor resmi kalurahan untuk mendapatkan informasi, konsultasi serta melakukan pengajuan dokumen tertentu dengan lebih praktis dan efisien.

Pemanfaatan media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok dan website resmi juga semakin meningkatkan transparansi dan komunikasi antara pemerintah kalurahan dan masyarakat. Informasi terkait program kerja, pengumuman penting, hingga berbagai kegiatan yang berlangsung di Kalurahan Sambirejo dapat diakses dengan mudah oleh seluruh warga. **(Feb)-f**

PELATIHAN ‘GROWTH MINDSET’ GURU

Tingkatkan Kreativitas Pembelajaran

SLEMAN (KR) - Guru sebagai pendidik harus melatih *growth mind* atau pola pikir berkembang, baik untuk dirinya sendiri maupun anak didiknya, agar tercipta, mampu meningkatkan kreativitas pembelajaran, yakni pendidikan yang kreatif dan inovatif. “Pola pikir guru harus berubah; ketika menghadapi kesulitan dalam mengajar, interaksi mereka harus diarahkan kepada Tuhan, bukan hanya kepada institusi sekolah,” kata Dr Dian Hidayati, Ketua Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) di SD Muhammadiyah, Gunungharjo (SD Ghardu), Kapawon Prambanan, Sleman, Rabu (5/3).

Kegiatan ini bertajuk ‘Pelatihan Growth Mindset Guru untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran dan Kreativitas



KR - Istimewa

Dr Dian Hidayati (depan) menyampaikan materi ‘Growth Mindset’.

Siswa diikuti oleh guru dari SD Ghardu serta guru TK/PAUD di sekitarnya. Materi disampaikan Dr Dian Hidayati (dosen Magister Manajemen Pendidikan) bersama Hani Irawati MPd (dosen Pendidikan Biologi FKIP).

Menurut Dian Hidayati, sangat penting memiliki

pola pikir berkembang (*growth mindset*) bagi para guru, meskipun berada di sekolah terpencil. “Growth mindset mendorong guru untuk berpikir maju, beradaptasi dengan perubahan, dan optimis terhadap keseharian mereka. Sebaliknya, pola pikir tetap (*fixed*

mindset) dapat melemahkan semangat dan menghambat perubahan,” katanya.

Sementara itu, Hani Irawati MPd menyatakan, guru harus mampu memaksimalkan segala potensi yang dimiliki untuk mendukung pembelajaran yang menyenangkan dan mudah dipahami oleh peserta didik.

Sedangkan Kepala SD Ghardu, Yuni Winarti MPd mengatakan, kolaborasi ini mencerminkan jalinan erat antara kampus dan alumni dalam meningkatkan kualitas pendidikan. “Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan komitmen dosen UAD dalam mengembangkan pola pikir berkembang dan inovasi, baik di bidang pendidikan maupun pemberdayaan masyarakat,” kata alumni Magister Manajemen Pendidikan FKIP - UAD. **(Jay)-f**

KERJA SAMA FH UII - IDN GLOBAL - BPHN

Diklat Paralegal Bersertifikat bagi PMI

SLEMAN (KR) - Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) bekerja sama dengan Indonesian Diaspora Network (IDN) Global dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyelenggarakan diklat Batch-1 sertifikasi paralegal bersertifikat. Diklat diikuti 50 peserta baik dari Pekerja Migran Indonesia yang berada di Singapura, Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Kuwait, Jepang, dan negara-negara lainnya.

Diklat dilaksanakan sekitar dua bulan hingga 16 April melalui jaringan online. Hadir sebagai narasumber di antaranya dosen, praktisi advokat Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum FH UII, hingga staff Ahli Badan Pembinaan Hukum Nasional yang berkompeten. Juga Dosen Universitas Sains dan Teknologi Nasional (Yuntech) dan Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM).

Dekan FH UII Prof Dr Budi Agus Riswandi mengemukakan, kehadiran fakultas memberikan edukasi sebagai bentuk dharma perguruan tinggi bagi Pekerja Migran

Indonesia (PMI). Mereka saat ini sedang berada di luar negeri untuk bekerja memenuhi kebutuhan ilmu dalam kegiatan kesehariannya.

“Diklat ini wajib diberikan, mengingat kondisi internal seringkali PMI mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi oleh atasan, teman kerja, bahkan bisa jadi sesama PMI. Bagaimana cara PMI agar dapat mengadvokasi dirinya sendiri atau bahkan orang lain, mereka dapat belajar melalui diklat ini,” jelasnya, Rabu (5/3).

Vice President Divisi Pekerja Migran IDN Global Nathalia Widjaja menyambut baik upaya FH UII dalam pelaksanaan Diklat Batch-1 sertifikasi bagi PMI. Semua



KR-ISTIMEWA

Prof Dr Budi Agus Riswandi dan Nathalia Widjaja.

ini akan dapat memberikan akses untuk bantuan hukum struktural yang belum memadai di luar negeri. “Apalagi biaya jasa konsultan hukum asing di tiap negara tentu berbeda. Bahkan seringkali terjadi overcharging terhadap PMI. Belum lagi masalah keperdataan seperti utang-piutang, pinjaman online dan sebagainya,” tambah Natasha.

Sementara Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha menuturkan harapannya kerja sama dan sinergitas FH UII, Indonesian Diaspora Network Global dan Badan Pembinaan Hukum Nasional memiliki luaran tangguh. Terutama melahirkan paralegal yang andal dalam penyelesaian sengketa bagi dirinya sendiri dan sesama PMI. **(Fsy)-f**



DPRD KABUPATEN SLEMAN SUARA WAKIL RAKYAT

Jl. Parasamya, Tridadi, Sleman, DIY Kode Pos 55511. Telp (0274)868413, Fax (0274) 868413

Genjot PAD untuk Menopang Anggaran Terkena Efisiensi

SLEMAN (KR) - Presiden Prabowo Subianto mempunyai kebijakan untuk melakukan efisiensi anggaran mulai dari kementerian hingga pemerintah daerah. Dengan adanya kebijakan itu, banyak anggaran dari pemerintah pusat ke Pemerintah Kabupaten Sleman akan terkena imbasnya. Untuk menopang anggaran yang terkena efisiensi, Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Anggota DPRD Sleman dari Fraksi PAN Respati Agus Sasangka SIP mengatakan, angka kemiskinan, jumlah pengangguran, angka stunting merupakan angka yang masih tinggi untuk ukuran Kabupaten Sleman. Tentu ini menjadi PR besar bagi pemerintah daerah. Untuk menyelesaikan permasalahan sosial tersebut, membutuhkan anggaran yang cukup besar. Namun dalam satu sisi, ada kebijakan efisiensi anggaran.

“Peningkatan kesejahteraan itu butuh anggaran. Ini jadi tantangan bagi Bupati dan Wakil Bupati baru untuk menyelesaikan permasalahan sosial di Sleman,” kata Respati, Rabu (5/3).

Pilihan kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah daerah adalah menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dimana selama ini PAD Sleman paling banyak ditopang dari sektor pajak hotel dan restoran. “Pajak hotel dan restoran itu sekitar 30 persen dari total PAD di Sleman. Kami berharap itu dapat digenjot untuk menopang anggaran yang terkena efisiensi,” ucap pria yang kerap disapa Ade ini.

Respati Agus Sasangka SIP Anggota DPRD Sleman dari Fraksi PAN



KR-Saifullah Nur Ichwan

Ade menduga, potensi PAD di Kabupaten Sleman sesungguhnya jauh lebih tinggi dari PAD yang saat ini diterima. Dirinya menilai masih ada potensi pendapatan yang belum dimaksimalkan secara optimal. “Kalau dilihat dari potensi pariwisata di Sleman, saya menduga pendapatan kita belum sesuai potensi pendapatan. Jadi perlu dimaksimalkan lagi,” ujar anggota Komisi B ini.

Untuk menggenjot PAD tersebut, tentu perlu ada kajian yang mendalam dengan melibatkan pihak ketiga seperti perguruan tinggi. Kajian itu akan ja-

di pedoman pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi yang ada saat ini. “Kita menggenjot PAD harus ada dasarnya, bukan sekadar mengejar angka saja. Tapi harus mempunyai data, potensi pendapatan di Sleman itu berapa? Kemudian mana saja potensi yang belum terkena pajak dan mana yang belum optimal. Disitulah baru digenjot,” kata anggota dewan dari Dapil Mlati-Gamping ini.

Ade juga menyarankan kepada eksekutif supaya dapat menempatkan orang-orang yang tepat dan mampu meningkatkan PAD. Bahkan jika perlu dilakukan evaluasi setiap tahun agar kinerjanya lebih optimal. “Orang yang menempati jabatan itu harus siap dievaluasi setiap tahun untuk melihat apakah mampu meningkatkan PAD atau tidak. Kalau kinerjanya kurang optimal, Bupati harus berani mengganti. Tujuannya untuk memotivasi pegawai agar bekerja dengan lebih optimal, khususnya dalam peningkatan pendapatan,” saran Ade. **(Sni)-f**